DEMOKRASI, OTONOMI DAERAH DAN

SISTEM POLITIK DI INDONESIA

MATERI SMP DAN SMA

Disampaikan dalam Pembekalan Calon Praktikan PPL Program Studi PPKn

FKIP – Universitas Ahmad Dahlan 28 Juni 2012



Oleh

Dra. Triwahyuningsih, M.Hum

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Ahmad Dahlan

Yogyakarta

2012

**DEMOKRASI**

1. **Konsep Demokrasi**
2. Demokrasi Konstitusional
3. Demokrasi Parlementer
4. Demokrasi Terpimpin
5. Demokrasi Pancasila
6. Demokrasi Rakyat.

Dan lain-lain

Demokrasi dari bahasa Yunani demos berarti rakyat dan Kratos berarti kekuasaan. Bisa diartikan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam pertumbuhannya pada Zaman Yunani Kuno (abad 6- ke 3 SM) diterapkan demokrasi langsung sedangkan demokrasi modern menerapkan demokrasi perwakilan.

Penerimaan warga dunia terhadap demokrasi tidak mempedulikan budaya, agama, ideology, ras, jenis kelamin, letak geografis dan suku bangsa mereka.

Robert A. Dahl dalam bukunya “ On Democracy” mengemukakan 10 proposisi mengapa memilih demokrasi :

1. Demokrasi mencegah sistem pemerintahan yang keji dan sewenang-wenang.
2. Demokrasi menjamin hak-hak fundamental warga negaranya, yang oleh sistem lain sering dikesampingkan.
3. Demokrasi lebih menjamin kebebasan warga negara;
4. Demokrasi membantu warga negaranya melindungi kepentingan fundamentalnya;
5. Demokrasi memberikan kesempatan lebih luas bagi warganya untuk menentukan nasib sendiri, hidup sesuai pilihannya berdasarkan hukum.
6. Demokrasi melakukan tanggung jawab moral ;
7. Demokrasi menjamin perkembangan kemanusiaan ;
8. Demokrasi menjamin kesetaraan politik yang lebih tinggi atas warganya;
9. Demokrasi suka menghindari perang terhadap negara lain;
10. Demokrasi cenderung lebih makmur.
11. **Syarat-syarat negara Demokrasi**

l. Perlindungan konstitusional

2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

3. Pemilu yang bebas

4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat

5. Kebebasan berserikat

6. Pendidikan Kewarganegaraan

Demokrasi didasarkan atas beberapa nilai (Henry B. Mayo) yaitu :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga;
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sering berubah;
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum;
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity)
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Sistem politik yang demokratis adalah sistem politik di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan secara bebas.

Faktor karakter warga negara dalam konsolidasi demokrasi, menurut Robert A. Dahl demokrasi sebagai sistem politik menekankan responsifitas pemerintah terhadap keinginan warga negaranya yang setara secara politis, yaitu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk :

1. Merumuskan keinginannya;
2. Menunjukkan preferensinya (keinginannya) kepada sesame warga negara dan pemerintah melalui tindakan pribadi maupun kolektif;
3. Mengusahakan agar kepentingannya itu dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah artinya tidak didiskriminasikan berdasarkan isi atau asal usulnya.

Ketiga kesempatan ini pada gilirannya tergantung pada tersedia tidaknya delapan kondisi yang dijamin oleh lembaga-lembaga dalam masyarakat, yaitu :

1. Kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi;
2. Kebebasan mengeluarkan pendapat;
3. Hak memilih;
4. Kesempatan menjadi pejabat pemerintah;
5. Hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam mencari dukungan dan meraih suara;
6. Sumber-sumber informasi alternative;
7. Pemilu yang bebas dan adil;
8. Adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijakan publik tergantung pada perolehan suara dalam pemilu dan pada cara-cara penyampaian preferensi lainnya.

Kedelapan kondisi di atas mencakup tiga dimensi demokrasi yaitu :

l. Kompetisi

2. Partisipasi

3. Kebebasan

yang merupakan ukuran demokrasi.

Pendidikan politik bagi warga negara bisa disederhanakan sebagai pendidikan demokrasi. Ada tiga nilai yang diajarkan berkaitan dengan demokrasi, Yaitu :

l. Posisi individu dalam kehidupan bernegara;

2. Posisi konstitusi dalam kehidupan bernegara;

3. Posisi negara dalam menjalin relasi dengan warganya.

1. **Perkembangan Demokrasi di Indonesia**

l. Demokrasi Parlementer (l945-l959)

Menonjolkan peranan parlemen sertai parta-partai.

Berdasarkan UUD l945 yang disahkan 18 Agustus l945, sistem pemerintahan Indonesia presidensial. Kekuasaan Presiden merupakan kekuasaan “tunggal” tanpa didampingi oleh kekuasaan lain. Oleh karena itu menjadi “bulan-bulan-an” Belanda dalam propaganda di luar negeri bahwa pemerintahan Indonesia yang dibentuk adalah pemerintahan dictator, pemerintahan terpusat atau terkonsentrasikan di satu tangan yaitu Presiden. Selanjutnya diambillah kebijakan:

1. Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun l945 tanggal 16 Oktober yang isinya mengubah kedudukan dan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula hanya sebagai pembantu Presiden berdasarkan Aturan Peralihan pasal 4 menjadi sebuah lembaga pembuat Undang-undang bersama-sama dengan Presiden dan berfungsi menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
2. Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember l945 yang isinya penetapan susunan Kabinet di bawah Perdana Menteri Sutan Syahrir dan mengubah sistem presidensial menjadi parlementer.
3. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember l945 tentang pembentukan partai-partai politik.

Sebab-sebab gagalnya praktek demokrasi parlementer di Indonesia :

1. Sistem multi partai
2. Sikap mental partai yang belum demokratis
3. Tidak ditemukan partai dominan, sehingga koalisi menjadi rapuh

Sistem parlementer mendapatkan legalitasnya di dalam pasal 118 (2) Konstitusi RIS dan pasal 83 (2) UUDS.

Tidak stabilnya pemerintahan 1945-1959 merupakan salah satu indikasi gagalnya suatu sistem politik, ditandai dengan jatuh bangunnya cabinet selama 14 tahun 17 kali ganti Kabinet.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Kabinet | Tanggal dibentuk |
| 1 | Kabinet Hatta | 19 Agt l945 |
| 2 | Kabinet Syahrir I | 4 Nop l945 |
| 3 | Kabinet Syahrir II | 29 Juni l945 |
| 4 | Kabinet Syahrir III | 2 Oktober l946 |
| 5 | K. Amir Syarifuddin | 3 Juli l947 |
| 6 | Kabinet Hatta II | 29 Januari l948 |
| 7 | K. Sjafruddin Prawironagoro | 19 Des l948 |
| 8 | Kabinet Hatta III | 4 Agt l949 |
| 9 | Kabinet A. Halim | 6 Januari l950 |
| 10 | Kabinet RIS/Hatta | 9 Des l949 |
| 11 | Kabinet M. Natsir | 6 Sept l950 |
| 12 | Kabinet Soekiman | 27 April l951 |
| 13 | Kabinet Wilopo | 3 April l952 |
| 14 | K. Ali Sastroamidjojo I | 1 Agt l953 |
| 15 | K. Burhanudin Harahap | 12 Agt l955 |
| 16 | K. Ali Sastroamidjojo II | 24 Maret l956 |
| 17 | Kabinet Djuanda | 9 April l957-9 Juli l959 |

1. Demokrasi Terpimpin (l959-l965)

Ditandai dengan Dekrit Presiden 5 Juli l959 kembali ke UUD l945, dengan ciri-ciri :

1. Dominasi Presiden
2. Terbatasnya peran partai
3. Berkembangnya pengaruh komunis
4. Meluasnya peranan ABRI dengan dwifungsinya.

Praktek demokrasi Terpimpin gagal bersamaan dengan pemberontakan G 30 S/PKI 30 September l965 yang sekaligus menghancurkan kekuasaan Soekarno.

1. Demokrasi Pancasila (l965-l998).

Istilah ini ditemukan di dalam Tap MPR No. XXXVII/MPRS/l968

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai , disemangati dan didasari oleh falsafah Pancasila. Demokrasi yang tetap mendasarkan pada konstitusi. Dijalankan dengan berdasarkan Pancasila dan UUD l945 secara murni dan konsekuen. Semboyan “ Pembangunan ekonomi yes, politik no”

1. Demokrasi mencari bentuk (Pancasila/ Orde Reformasi) l998- sekarang
   * Sistem Multipartai
   * Meningkatnya peran DPR
   * Kuatnya lembaga Presiden karena dipilih langsung

**OTONOMI DAERAH**

**ARTI OTONOMI DAERAH**

Otonomi daerah dalam makna sempit dapat diartikan sebagai “ mandiri”. Sedangkan dalam makna luas diartikan sebagai “berdaya”. Definisi dari otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerah sendiri.

Definisi desentralisasi oleh United Nation adalah:

*“Decentralization refers to the transfer of authority away from the national capital whether by deconcentration (i.e delegation) to field offices or by devolution to local authorities or local bodies”*

Desentralisasi adalah pelimpahan kewenagan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

**ARTI PENTING OTONOMI DAERAH- DESENTRALISASI**

Pada masa orde baru, kebijakan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari upaya politik Pemerintah pusat untuk merespon tuntutan kemerdekaan atau Negara federal dari beberapa wilayah yang memiliki aset sumber daya alam melimpah namun tidak mendapatkan haknya secara proporsional pada masa orde baru. Desentralisasi dianggap dapat menjawab pemerataan pembangunan sosial-ekonomi, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan kehidupan berpolitik yang efektif.

Arti penting otonomi daerah- desentralisasi:

1. Untuk terciptanya efisiensi-efektivitas penyelenggaraan pemerintah.

Pemerintah berfungsi mengelola berbagai dimensi kehidupan seperti bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, keamanan dalam negeri dll. Hal- hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara yang sentralistik, dan pemerintah Negara menjadi tidak efisien dan tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

1. Sebagai sarana pendidikan politik.

Banyak kalangan ilmuan politik berargumentasi bahwa pemerintah daerah merupakan kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi dalam sebuah Negara. Dengan demikian, pendidikan politik pada tingkat lokal sangat bermanfaat bagi warga masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya.

1. Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir polotik lanjutan.

Banyak ilmuan politik sepakat bahwa pemerintah daerah merupakan langkah persiapan untuk meniti karier lanjutan, terutama karir di bidang politik dan pemerintahan di tingkat nasional. Sebagai contoh: mantan presiden Amerika George Bush, Bill Clinton, Ronald Reagan, Jimmy Carter dll, mereka sebelumnya adalah Gubernur di Negara Bagian dimana mereka berasal.

1. Stabilitas politik

Sharpe berargumentasi bahwa stabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal. Gejolak disintegrasi yang terjadi di beberapa daerah merupakan contoh yang sangat konkrit bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dengan ketidakstabilan politik kalau pemerintah nasional tidak menjalankan otonomi daerah.

1. Kesetaraan politik.

Dengan dibentuknya pemerintahan daerah maka kesetaraan politik di antara berbagai komponen masyarakat akan terwujud. Warga masyarakat baik secara sendiri-sendiri atau pun secara berkelompok akan ikut terlibat dalam mempengaruhi pemerintahannya untuk membuat kebijakan, terutama yang menyangkut kepentingan mereka.

1. Akuntabilitas politik.

Demokrasi memberikan ruang dan peluang kepada masyarakat, termasuk di daerah, untuk berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan penyelengaraan negara. Dengan demikian maka kebijakan yang dibuat akan dapat diawasi secara langsung dan dapat dipertanggungjawabkan karena masyarakat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**VISI OTONOMI DAERAH**

Visi desentralisasi merupakan symbol adanya *trust* (kepercayaan) dari Pemerintah Pusat kepada Daerah. Dengan berlakunya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999, artinya pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggungjawab. Pemerintah pusat tidak lagi mendominasi, akan tetapi pemerintah melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi otonomi daerah.

Visi otonomi daerah sebagai berikut:

1. Politik

Harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelengaraan pemerintah yang resopnsif.

1. Ekonomi

Terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.

1. Sosial

Menciptakannya kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan disekitarnya. Berdasarkan visi ini, maka konsep dasar otonomi daerah yang kemudian melandasi lahirnya UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999, merangkum hal-hal berikut ini:

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah.
2. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakayt lokal dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah.
3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur berkualitas tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.
4. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah.
5. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.

**MODEL DESENTRALISASI**

Rondinelli membedakan empat bentuk desentralisasi, yaitu (1) *Deconcentration*, (2) *delegation to semi-autonomous and parastatal agencies*, (3) *devolution to local governments*, dan (4) *nongovernment institutions* ( Teguh Yuwowno, ed., ed 2001, h. 29-34).

MODEL desentralisasi:

1. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan pembagian kewenagan dan tanggungjawab administrative antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan.

Dua tipe dekonsentrasi menurut Rondinelli, yaitu:

* *Field administration* (Administrasi lapangan)

Dalam tipe ini, pejabat lapangan diberi keleluasaan untuk mengambuil keputusan seperti merencanakan, membuat keputusan-keputusan rutin dan menyesuaikan pelaksanaan pusat dengan kondisi setempat.

* *Local administration* ( Administrasi lokal)

Administrasi lokal dibagi menjadi dua, yaitu:

* *Integrated local administration* ( administrasi lokal yang terpadu).

Tenaga-tenaga dari departemen pusat yang ditempatkan di daerah berada langsung di bawah peintha dan supervisi Kepal Daerah yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pemnerintah pusat.

* *Untegrated local administration* ( administrasi lokal yang tidak terpadu)

Tenaga-tenaga pemerintah pusat yang berada di daerah dan Kepala Daerah msiung- masing berdiri sendiri.

1. Delegasi

Bentuk kedua yang disebutkan oleh Rondinelli adalah pemilahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Di beberapa Negara berkembang, bentuk delegasi ini dilaksanakan dengan memberikan tanggung jawab kepada korporasi public, agen pembangunan regional, pemegang otoritas fungsi- fungsi khusus unit implementasi proyek yang bersifat resmi otonomi dan beberapa organisasi lainnya.

1. Devolusi

Devolusi adalah transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah.

Lima karakteristik Devolusi, yaitu:

* Unit pemerintahan lokal bersifat otonom, mandiri, dan secara tegas tyerpisah dari tingkat- tingkat pemerintahan.
* Unit pemerintahan lokal diakui mempunyai batas-batas wilayah yang jelas dan legal, yang mempunyai wewenang untuk melakukan tugas- tugas umum pemerintahan.
* Unit pemerintahan daerah berstatus sebagai badan hukum dan berwenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber daya untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
* Unit pemerintahan daerah diakui oleh warganya sebagai suatu lembaga yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka.
* Terdapat hubungan yang saling menguntungkan daerah serta unit- unit organisasi lainnya dalam suatu sistem pemerintahan.

1. Privatisasi

Menurut Rondinelli privatisasi adalah transfer tindakan pemberian kewenangan dari pemerintahan kepada badan- badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat. Rondinelli menjelaskan melalui privatisasi pemerintahan menyerahkan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi nirlaba atau mengizinkan mereka membentuk perusahaan swasta.

**SEJARAH OTONOMI DAERAH DI INDONESIA**

1. UU No.1 Tahun 1945
2. UU No.22 Tahun 1948
3. UU No.1 Tahun 1957
4. UU No.18 Tahun 1965
5. UU No.5 Tahun 1974
6. UU No.22 Tahun 1999
7. UU No.25 Tahun 1999

PRINSIP- PRINSIP OTONONI DAERAH DALAM UU NO. 22 TAHUN 1999

Prinsip- prinsip otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana terdapat dalam UU no. 22 tahun 1999 adalah ( Nur Rif’ah Masykur, peny., 2001,h.21)

1. Demokrasi keadilan, pemerataan, potensi, dan keanekaragaman daerah.
2. Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Otonomi Daerah dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota.
4. Sesuai dengan konstitusi Negara.
5. Kemandirian daerah otonom.
6. Meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah.
7. Asas dekonsesntrasi diletakkan pada daerah propinsi sebagai wilayah administrasi.
8. Asas tugas pembantuan.

**PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA PUSAT DAN DERAH DALAM UU No.22 TAHUN 1999**

Kewenangan dari pemerintah pusat dalam UU No. 2 Tahun 1999 adalah hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, pradilan, moneter, agama, dan berbagi jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat, seperti kebijakan makro ekonomi, standarisasi nasional, administrasi pemerintahan, badan usaha milik Negara dan pengembangan sumber daya manusia.

Kewenangan propinsi sebagai daerah administratif dalam Uu No. 22 tahun 1999 adalah:

* Kewenangan bersifat lintas Kabupaten dan Kota.
* Kewenangan pemerintahan lainnya, seperti perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro.
* Kewenangan kelautan.
* Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani daerah kabupaten dan kota.

Kewenangan pemerintah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom adalah:

* Pertahanan
* Pertanian
* Pendidikan dan Kebudayaan
* Tenaga kerja
* Kesehatan
* Lingkungan Hidup
* Pekerjaan umum
* Perhubungan
* Perdagangan dan Industri
* Penanaman modal
* Koperasi

Selain itu, kabupaten kota yang mempunyai batas laut juga diberi kewenangan kelautan seluas 1/3 dan luas kewenangan propinsi yang 12 mil. Jenis kewenangan lain yang dapat diselenggarakan oleh daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota ialah kewenangan pilihan, yaitu jenis kewenangan yang tidak termasuk yang ditangani Pusat dan Propinsi.

Penyerahan kesebelas jenis kewenangan ini kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota dilandasi oleh sejumlah pemikiran berikut:

1. Makin dekat produsen dan distributor pelayanan public dengan warga masyarakat yang dilayani, semakin tepat sasaran, mereata, berkualitas dan terjangkau pelayanan public tersebut.
2. Budaya, kearifan, potensi dan manusia lokal akan dapat diberdayagunakan secara maksimal.
3. Kewenangan ini dimaksudkan agar sumber daya manusia berkualitas di kota- kota besar diretribusikan dari Jakarata ke daerah otonom Kabupaten dan Kota.
4. Pengangguran dan kemiskinan sudah menjadi masalah nasional yang tidak hanya saja di pikulkan kepada pemerintah pusat semata.

**OTONOMI DAERAH DAN DEMOKRATISASI**

Eksistensi kebijakan otonomi daerah kiranya sangat penting dipahami sebagi bagian dari agenda demokratisasi kehidupan bangsa. Keberadaan kebijakan otonomi daerah akan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Keterkaitan otonomi daerah dengan demokrasi adalah memberikan otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya *auto-aktiviteit.* *Auto-aktiviteit* artinya bertindak sendir, melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan berkembangnya *auto-aktiviteit* tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi,y.i. pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga dan terutama memperbaikai nasibnya sendiri.

Konsekuensi otonomi daerah denagan demokratisasi adalah:

* Otonomi daerah harus dipandang sebagai instrument desentralisasi dalam rangka mempertahankan keutuhan serta keberagaman bangsa.
* Otonomi daerah harus di definisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah, bukan otonomi pemerintah daerah ( pemda), juga bukan otonomi bagi “ daerah”.

Otonomi daerah mensyaratkan pula adanya perubahan struktur perwakilan politik, berlakunya akuntabilitras pemerintahan, tegaknya supremasi hukum, dan rasionalitas birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, otonomi daerah sebagai paradigma baru mengharuskan perubahan struktur lembaga kenegaraan, sistem pemilu, restrukturisasi lembaga peradilan, dan perubahan birokrasi patrimonial- yang mengabdi pada kekuasaan- menjadi birokrasi rasional yang melayani kepentingan masyarakat.

**SISTEM POLITIK DI INDONESIA**

1. **Struktur dan Fungsi Politik**

Struktur politik merupakan keseluruhan bagian atau komponen (yang berupa lembaga-lembaga) dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Struktur politik adalah badan atau organisasi yang berkenan dengan urusan Negara. Untuk itu struktur politik selalu berkenaan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Umumnya struktur yang dimiliki oleh suatu sistem politik adalah kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi, dan badan-badan peradilan. Akan tetapi struktur tersebut tidak banyak membantu dalam memperbandingakan satu sistem politik yang satu terhadap sistem politik yang lainnya terkecuali struktur politik tersebut berjalan beriringan dengan fungsi dari sistem politik itu sendiri, atau dengan kata lain struktur dapat efektif dan tertata sejauh fungsinya sesuai dengan sistem politik yang ada.

Gambar dibawah ini menunjukkan bagan struktur dan fungsi politik.

Lingkungan fisik, sosial dan ekonomik domestik

Out put

dan pengaruh

Penghakiman kebijaksanaan

Penerapan kebijaksanaan

Pembuatan

Kebijaksanaan

Agresi

Kepentingan

Artikulasi kepentingan

Input

Sosialisasi

Politik

Rekrutmen

Politik

Komunikasi

Politik

BIROKRASI

EKSEKUTIF

BADAN LEGISLATIF

PARTAI

POLITIK

BADAN PERADILAN

KELOMPOK

KEPENTINGAN

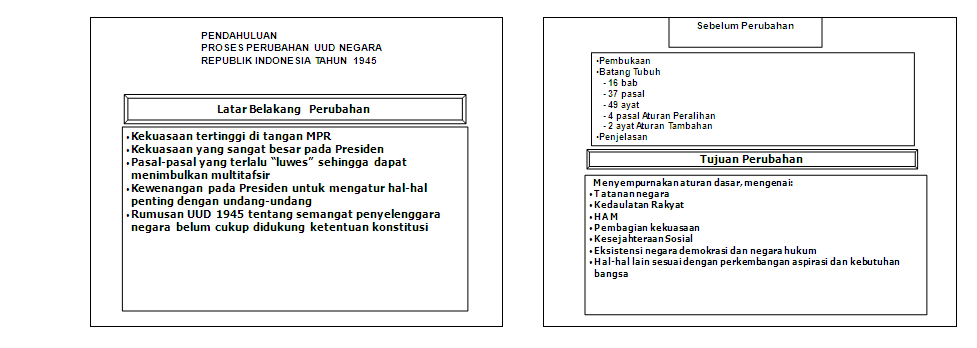
Di tengah-tengah gambar tersebut terdapat tiga fungsi politik yang tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah (*public policy)* tetapi sangat penting dalam menentukan cara bekerjanya sistem politik. Panah-panah yang berasal dari fungsi-fungsi dan menunjuk pada masyarakat (lingkungan domestik), dan pada kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi dan badan-badan peradilan menggambarkan pengaruh dari ketiga fungsi ini. Sedangkan di pinggir-pinggir lingkaran tersebut merupakan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan kebijaksanaan dalam setiap sistem politik.

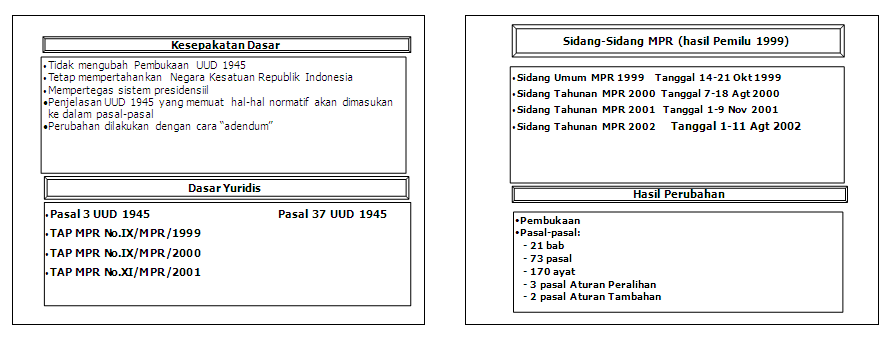
Ketika berbicara struktur politik maka yang akan diperbincangkan adalah tentang mesin politik sebagai lembaga yang dipakai untuk mencapai tujuan, berdasarkan jenisnya struktur politik terbagi menjadi dua, yaitu mesin politik Informal (infra struktur politik) dan mesin politik Formal (supra struktur politik).

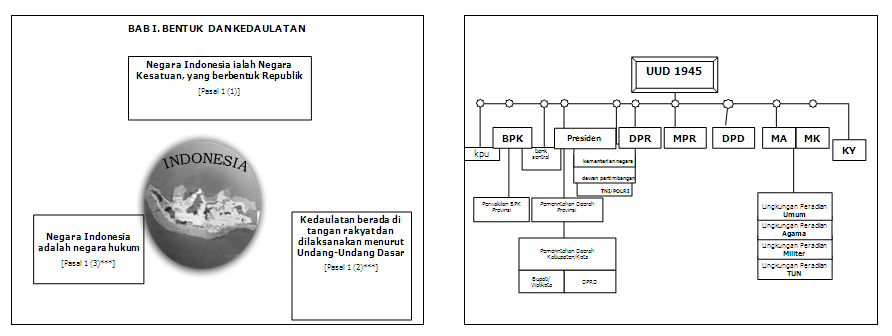
1. Mesin politik Informal (infra struktur politik), yaitu mesin politik yang ada dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara. Pengelompokan infra struktur politik antara lain adalah sebagai berikut:
   1. Partai Politik, yaitu suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki nilai, orientasi, dan cita-cita yang sama, dengan tujuan mendapatkan kekuasaan politik dengan cara yang konstitusional, seperti melalui pemilihan umum.
   2. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang dibentuk dengan tujuan-tujuan dalam bidang sosial, dan budaya, organisasi ini tidak melibatkan diri untuk ikut serta dalam pemilihan umum.
   3. Kelompok Kepentingan (Interest Group), yaitu kelompok yang berusha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok kepentangan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung, kelompo ini tidak ikut dalam pemilihan umum.
   4. Kelompok Penekan( Pressure Group), yaitu kelompok yang dapat mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui cara persuasi, propaganda, atu cara-cara lain yang dipandang lebih efektif. Mereka antara lain, industriawan, dan asosiasi lainnya.
   5. Kelompok Tokoh Masyarakat (Opinian Leaders), yaitu kelompok dari tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh-tokoh agama, masyarakat adat, dan budaya.
   6. Media Massa (Pers), yaitu media massa dalam arti sempit, yang meliputi surat kabar, koran, majalah, tabloit, dan buletin-buletin pada kantor, maupun media massa dalam arti luas, yang meliputi media cetak, audio, audio visual, dan media elektronik.
2. Mesin politik formal (supra struktur politik), yaitu mesin politik yang ada dalam Negara yang memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik Negara. Lembaga yang dapat disebut sebagai supra struktur politik meliputi: Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif dan Lembaga Yudikatif. Sedangkan lembaga supra struktur politik di indonesia adalah lembaga-lembaga yang ada pada kehidupan politik pemerintah atau negara indonesia sebagaimana terdapat dalam UUD 1945, yang meliputi :
   1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
   2. Dewan Perwakilan Rakyat
   3. Presiden
   4. Makamah Agung
   5. Mahkamah Konstitusi
   6. Komisi Yudisial
   7. Badan Pemeriksa Keuangan
   8. Lembaga lain peyelenggaraan pemerintahan seperti MENTERI, JAKSA, POLISI, TNI, dll.

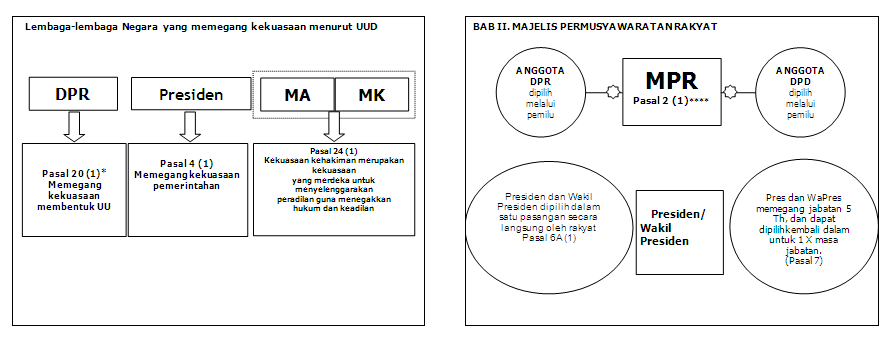
Adapun hubungan antara Supra struktur politik dengan Infra struktur politik adalah sebagai berikut :

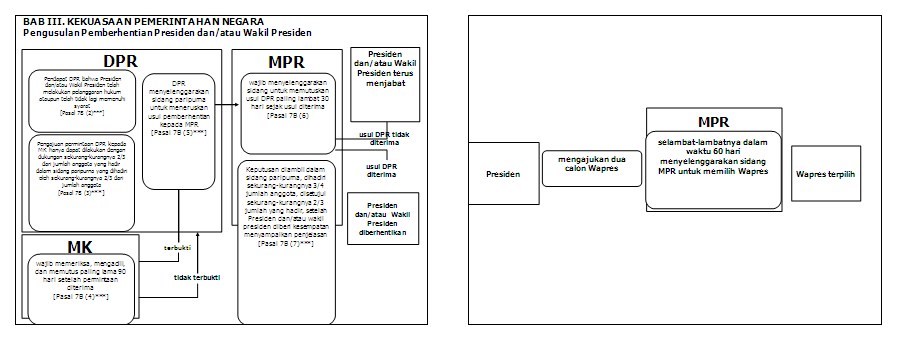
Unsur-unsur yang ada dalam supra struktur dan infra struktur politik saling mempengaruhi, dimana supra struktur politik sebagai pembuat keputusan akan mendapat masukan, tuntutan dan aspirasi dari infra struktur politik, sebaliknya Infra struktur akan menopang dan melaksanakan segala produk dan kebijakan supra struktur politik. Maka dapat disimpulkan bahwa antara supra struktur politik dengan infra struktur politik terdapat hubungan yang saling mempengaruhi sehingga menumbuhkan suasana kehidupan politik yang serasi. Infra struktur politik memberikan masukan kepada supra struktur politik. Sedangkan supra struktur politik memperhatikan masukan dan menentukan kebijakan-kebijakn umum atau keputusan politik yang sah dan mengikat semua pihak.

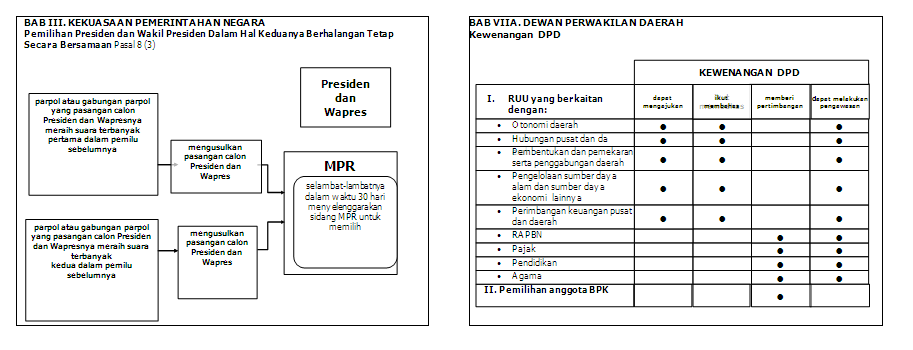
****

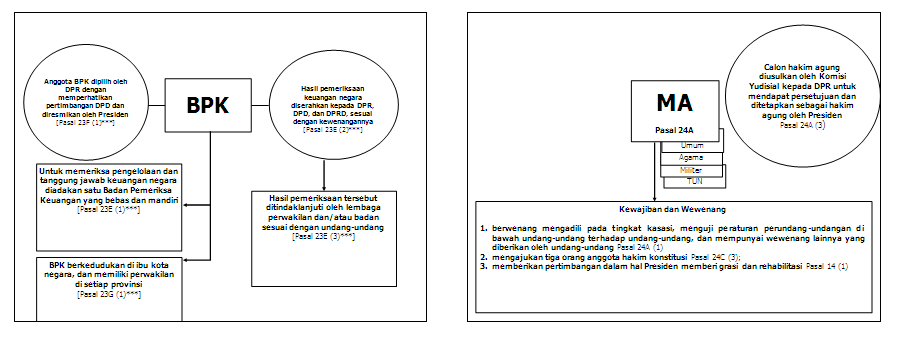
****

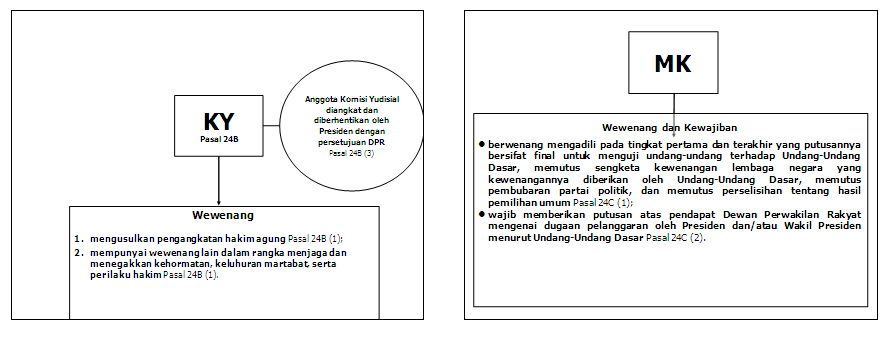
****

****

****

****

****

****

**Kelompok Kepentingan**

Kelompok kepentingan merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang mempunyai kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan, keinginan-keinginan, yang sama, dan mereka melakukan kerjasama untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah demi tercapainya kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan tadi. Kadang-kadang istilah “*pressure group*” atau kelompok penekan dipergunakan untuk menyebut kelompok kepentingan, hal ini terjadi karena kelompok kepentingan sering muncul untuk menekan pemerintah. Namun kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintah secara langsung. sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin atau anggotanya memenangkan kedudukan-kedudukan politik berdasarkan pemilu, kelompok kepentingan itu sendiri tidak dipandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintahan.

Kelompok kepentingan pada dasarnya berbeda dengan partai politik**,** kelompok kepentingan tidak bertujuan untuk merebut jabatan publik sebagaimana partai politik, tapi lebih fokus kepada upaya bagaimana mempengaruhi proses pembuatan kebijakan,khusunya pembuatan kebijakan yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap kepentingan mereka. Kelompok kepentingan dapat di bedakan menurut jenisnya yaitu: Kelompok kepentingan Anomik, Kelompok kepentingan Non-Assosiasional,Kelompok kepentingan Institusional**,** dan Kelompok kepentingan Assosiasional.

* 1. Kelompok kepentingan Anomik

Kelompok kepentingan ini melakukan kegiatan-kegiatannya secara spontan dan hanya seketika itu saja, karena kelompok kepentingan tipe ini tidak memiliki norma-norma dan nilai-nilai yang secara jelas mengaturnya. Kelompok kepentingan anomik ini pada umumnya melakukan kegiatan-kegiatannya dengan cara-cara yang non-konvensional, seperti pemogokan, demonstrasi, huru-hara, kerusuhan, konfrontasi, dan lain-lainnya yang sejenis dengan itu. Demikian pula kelompok kepentingan anomik ini merupakan suatu kelompok yang tidak terorganisir secara rapi. Karena sifat kelompok kepentingan tipe ini spontan, maka ikatan yang menjalin diantara pendukung-pendukungnya sedemikian longgar, dan mengakibatkan pula tidak terdapatnya peraturan-peraturan yang mengikat pendukung-pendukungnya secara ketat. Pendukung-pendukung kelompok ini dapat secara bebas keluar meninggalkan kelompok, karena biasanya setelah mereka berhasil dalam mengajukan tuntutan dan kepentingannya kelompok ini akan bubar dengan sendirinya.

* 1. Kelompok Non-Assosiasional

Kelompok ini merupakan kelompok kepentingan yang dapat dikatakan kurang terorganisir secara rapi, dan kegiatannya masih bersifat kadang kala saja. Keanggotaan kelompok kepentingan non assosiasional dapat diperoleh berdasarkan atas kepentingan-kepentingan yang serupa karena persamaan-persamaan dalam hal-hal yang tertentu; seperti keluarga, status, kelas, kedaerahan, keagamaan, keturunan atau ethnis. Pendukung-pendukung kelompok ini dalam mengartikulasi kepentingan-kepentingannya melalui individu-individu, klik-klik / link, pemuka-pemuka agama, dan lain-lain yang semacam dengan itu.

Kelompok kepentingan tipe ini tidak mempunyai struktur organisasi yang formal. Untuk dapat masuk menjadi anggota tidak harus melalui prosedur yang berbelit-belit seperti organisasi yang sifatnya formal. Demikian pula dalam kegiatan pemilihan pemimpin kelompok, atau dalam merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan kelompok.

* 1. Kelompok Institusional

Kelompok kepentingan tipe ini merupakan kelompok kepentingan yang bersifat formal, yang sudah terorganisir secara rapi dan teratur. Demikian pula kelompok tipe ini juga memiliki fungsi-fungsi social dan politik yang lainnya disamping berfungsi mengartikulasikan kepentingan. Keanggotaan kelompok kepentingan institusional terdiri dari orang-orang professional dibidangnya. Untuk dapat masuk menjadi anggota kelompok kepentingan tipe ini diperlukan persyaratan-persyaratan formal yang memang telah ditentukan terlebih dahulu. Dan kelompok kepentingan tipe ini juga telah memiliki rencana kerja yang tersusun dengan baik.

Kelompok kepentingan institusional, baik sebagai suatu badan hukum ataupun sebagai kelompok-kelompok yang lebih kecil dalam badan hukum itu, selain mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya sendiri juga dapat mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang lainnya yang ada di dalam masyarakat.

* 1. Kelompok Assosiasional

Kelompok kepentingan assosiasional merupakan kelompok kepentingan yang memiliki struktur organisasi formal, dalam memperoleh pendukung-pendukungnya juga melalui prosedur-prosedur yang formal. Demikian juga untuk memilih atau menyeleksi pemimpin kelompok, dan untuk merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan kelompok harus memlalui prosedur-prosedur yang teratur yang kadang-kadang cukup berbelit-belit.

Kelompok assosional antara lain meliputi serikat-serikat buruh, serikat-serikat dagang, perkumpulan-perkumpulan para pengusaha. Kelompok kepentingan ini secara khas menyatakan atau mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dari kelompok yang tertentu, dan kelompok kepentingan ini juga telah memiliki tenaga-tenaga yang sudah professional di bidangnya.

**Partai Politik**

Partai politik merupakan sarana seseorang untuk melakukan partisipasi politik sebagai aktualisasi hak-haknya sebagai warga negara. Partai politik tidak bisa lepas dari peran warga negara sebagai pendukungnya. Melalui partai, seorang warga akan melakukan partisipasi politik, yang  mana hal ini mencakup semua kegiatan sukarela seseorang dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik, pembentukan kebijakan publik, memilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai, kelompok kepentingan, kelompok penekan, duduk dalam lembaga legislatif dan sebagainya.

* 1. **Pengertian Partai Politik**

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Adapun tujuan dibentuknya sebuah partai adalah untuk memperoleh kekuasaan politik, dan merebut kedudukan politik dengan cara (yang biasanya) konstitusional yang mana kekuasaan itu partai politik dapat melaksanakan program-program serta kebijakan-kebijakan mereka.

Berikut akan dipaparkan beberapa definisi partai politik oleh para ahli :

* Menurut R.H Soltau, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk mengendalikan dan menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijakan umum mereka.
* Menurut Carl J. Frederich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.
* Menurut Sigmund Neumann dalam bukunya Modern Political Parties,partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.
* Menurut Mark N. Hagopian, partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.
  1. **Sejarah Perkembangan Partai Politik**

Partai telah digunakan untuk mempertahankan pengelompokan yang sudah mapan seperti gereja atau untuk menghancurkan status quo seperti yang dilakukan Bolsheviks pada tahun 1917 pada saat menumbangkan kekaisaran Tsar.Pada awal abad ke-19 gereja katolik di Eropa menyatukan diri pada pemerintahan demokrasi, dan pemilihan sebagai sarana demokrasi dilaksanakan dengan jalan membentuk partai Kristen Demokrat yang secara bertahap melepaskan orientasi keagamaan mereka demi organisasi, program, dan panggilan partai. Langkah ini kemudian diikuti oleh pembentukan partai Sosialis yang meninggalkan cara revolusi untuk mengadakan perombakan. Setelah Perang Dunia Kedua, partai komunis mengalami hal yang sama. Sisi tajam revolusi sebagai ciri partai komunis menjadi tumpul. Di beberapa negara yang baru merdeka, partai politik muncul dengan misi menanamkan partisipasi dan kesadaran politik pada masyarakat yang merasa tidak puas dan terasingkan.

Tahap kedua perkembangan partai politik muncul setelah pertengahan abad ke-19. Pertama, perluasan daerah lingkup pemilihan di Amerika sekitar pertengahan tahun 1830-an dan antara 1848-1870, dan pada waktu yang hampir bersamaan juga terjadi di Jerman dan di negara-negara Eropa Barat lainnya. Abad ke-19 adalah abad politik, di mana masalah-masalah politik seperti pemilihan umum, kebebasan membentuk asosiasi, hubungan antara gereja dan negara, dab perkembangan instrumen demokrasi itu sendiri, telah menjadi isu utama dan perdebatan.

Tahap ketiga perkembangan parta-partai terjadi pada sebelum dan sesudah akhir abad ke-19. Pada periode ini Maurice Duverger secara jitu mengkaitkan pertumbuhan dari apa yang disebut partai-partai diluar parlemen (extra parliamentary parties). Cikal bakal organisasi tersebut sumbernya bukan berasal dari parlemen melainkan dari orang-orang yang tidak senang terhadap parlemen.

Keyakinan dan disiplin kaku menyertai munculnya partai-partai komunis Eropa Barat, yang didirikan setelah Perang Dunia I. Partai komunis pada dasarnya merupakan kombinasi antara seorang tentara dan sebuah gereja, keras pendirian, berdisiplin tinggi dan seringkali menentukan secara efektif komitmen dan loyalitas penuh para anggota secara individual. Setelah Perang Dunia II, semua partai politik Dunia Barat dan negeri industri maju (termasuk Uni Soviet dan Jepang) mulai menampakkan beberapa karakteristik baru. Semua partai menjadi semacam pedagang perantara (broker) dari suatu masyarakat yang terjadi karena kemajuan industri. Oleh karena itu partai menjadi lebih representatif dan lebih reformis. Partai tidak lagi berusaha menyelesaikan isu dengan penyelesaian total  yang mencakup struktur sosial dan ekonomi masyarakat tetapi lebih dengan kompromi dan perubahan sedikit demi sedikit.

Kondisi-kondisi di mana partai lahir dan berkembang di Barat jauh berbeda dengan kemunculan partai-partai di negara baru. Partai politik di negara bekas jajahan muncul untuk mengatasi masalah-masalah, yang pihak barat (pemerintah kolonial) tidak terlibat secara langsung. Serangkaian masalah tersebut adalah emansipasi dan identitas nasional, pembuatan nilai-nilai (aturan) tentang pelaksanaan partisipasi politik, penciptaan lembaga baru yang legitimate (absah), pembentukan norma-norma baru yang mendukung dan pembentukan lembaga pemerintah yang membagi ganjaran sementara menarik dukungan. Perbedaan antara Barat dan negara-negara baru sangatlah mudah. Di negara baru, tidak adanya sistem yang mendukung terciptanya partai politik, tidak ada legitimasi prosedur pemerintahan yang memungkinkan partai dapat beroperasi dan yang dapat didukung oleh partai yang hanya sedikit berpengalaman dengan sistem pemerintahan perwakilan dan tidak adanya pengertian umum yang mendefinisikan hak-hak umum tertentu secara terbatas.

* 1. **Tipe-Tipe Partai Politik**

Dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, partai politik dapat dibagi menjadi :

* + - * 1. Partai Kader

Disebut juga partai elite atau tradisional yang dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu tipe Eropa dan Amerika. Tipe Eropa bertujuan untuk mendapatkan anggota sebanyak mungkin, tetapi lebih  menekankan pada dukungan dari orang-orang terkemuka, lebih memperhatikan kualitas daripada kuantitas. Sedangkan tipe Amerika menekankan pada usaha menjaring tokoh partai yang loyal.

* + - * 1. Partai Massa

Tekhnik mengorganisasi partai dilakukan oleh gerakan sosialis, yang kemudian diambil oleh partai komunis dan banyak digunakan di negara-negara berkembang. Dapat dibedakan menjadi tipe sosialis, yang berorientasi terhadap kaum buruh. Tipe partai komunis yang diorganisasi secara otoriter dan terpusat, lebih menggambarkan sentralisasi daripada demokrasi. Tipe partai fasis, menggunakan tekhnik militer untuk mengorganisasi politik massa.

Tipe Partai Tengah

Yaitu partai yang menggunakan organisasi massa sebagai alat dukungan partai.

Dari segi sifat dan orientasi partai politik dibagi menjadi :

Partai Perlindungan (Patronage Party)

Partai perlindungan umumnya memiliki organisasi nasional yang longgar, disiplin yang lemah dan biasanya tidak mementingkan pemungutan suara secara teratur. Tujuan pendiriannya adalah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota yang dicalonkannya, partai ini hanya giat menjelang pemilihan umum.

Partai Ideologi

Biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijakan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat.

* 1. **Sistem Kepartaian**
     + - 1. Sistem partai tunggal

Merupakan sistem dimana hanya ada satu partai didalam satu negara. Partai tersebut memiliki kedudukan dominan dibandingkan dengan partai lain.

* + - * 1. Sistem dwi-partai

Pada sistem dwi-partai, partai-partai politik dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilihan umum). Partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama terhadap kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan.

* + - * 1. Sistem Multi-Partai

Sistem mult-partai memiliki banyak jenis partai politik didalamnya. Keanekaragaman ras, agama atau suku bangsa yang kuat membuat masyarakat cenderung untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas yang mereka miliki ke dalam satu wadah saja. Sistem multi-partai dianggap lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik daripada pola dwi-partai.

* 1. **Fungsi Partai Politik**
     + - 1. Sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat bisa diminimalkan.

* + - * 1. Sebagai sarana sosialisasi politik

Partai politik memainkan peran dalam membentuk pribadi anggotanya. Sosialisasi yang dimaksudkan adalah partai berusaha menanamkan solidaritas internal partai, mendidik anggotanya, pendukung dan simpatisannya serta bertanggung jawab sebagai warga negara dengan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan bersama.

* + - * 1. Sebagai sarana rekruitment politik.

Partai politik mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Cara-cara yang dilakukan oleh partai politik sangat beragam, bisa melalui kontrak pribadi, persuasi atau menarik golongan muda untuk menjadi kader.

* + - * 1. Sebagai sarana pengatur konflik.

Partai politik harus berusaha untuk mengatasi dan memikirkan solusi apabila terjadi persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat. Namun, hal ini lebih sering diabaikan dan fungsi-fungsi diatas tidak dilaksanakan seperti yang diharpakan.

* + - * 1. Sebagai sarana partisipasi politik

Partai politik harus selalu aktif mempromosikan dirinya untuk menarik perhatian dan minat warga negara agar bersedia masuk dan aktif sebagai anggota partai tersebut. Partai politik juga melakukan penyaringan-penyaringan terhadap individu-individu baru yang akan masuk kedalamnya.

1. **MODEL-MODEL SISTEM POLITIK**

para ilmuan politik mencoba menyusun model-model sistem politik dengan menggunakan kriteria yang berbeda, dan dengan cakupan penjelasan yang berlainan. Carter dan Herz, misalnya menggunakan dua kriteria untuk membedakan berbagai system politik di dunia ini, yaitu siapa yang memerintah dan ruang lingkup jangkauan kewenangan pemerintah. apabila pihak yang memerintah terdiri atas beberapa orang atau kelompok kecil orang maka sistem politik ini disebut pemerintahan “dari atas” atau lebih tegas lagi disebut oligarki, otoriter ataupun aristokrasi. di lain pihak, apabila pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang maka sistem ini disebut dengan demokrasi . selain itu, kalau kewenangan pemerintah pada prinsipnya mencakup segala sesuatu yanga da dalam masyarakat maka rezim ini disebut totaliter, sedangkan apabila pemerintah memiliki kewenangan yang terbatas maka yang membiarkan beberapa atau sebagian besar kehidupan masyarakat mengatur diri sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah apabiila kehidupan masyarakat dijamin dengan tata hokum yang disepakati bersama, maka rezim ini disebut liberal.

Kedua kriteria yang dikemukakan kedua ilmuan tersebut menyangkut hubungan kekuasaan, yaitu siapa pemegang kekuasaan dan hasil penggunaan kekuasaan itu. Lebih lengkap lagi apabila kriteria yang digunakan untuk membedakan sistem politik mencakup faktor-faktor, seperti kebaikan bersama, pemersatu atau identitas bersama, hubungan kekuasaan, prinsip legitimasi kewenangan dan hubungan politik dengan ekonomi.

Model sistem politik yang hendak diuraikan berikut ini lebih dilihat dari sudut historis dan perkembangan sistem politik, dimulai dari otokrasi tradisional ke totaliter dan sampai pada demokrasi.

1. **Sistem Politik Otokrasi Tradisonal**
2. Kebaikan Bersama

Faktor kebaikan bersama menyangkut pemahaman mengenal dua hal, yaitu persamaan dan kebebasan politik individu. Selain itu, ada pula perbandingan dua hal berikut ini, yaitu kebutuhan materiil dengan moril kolektivisme dengan individalisme.

Sistem politik ini ditandai dengan ciri-ciri berikut, kurang menekankan pada persamaan tetapi menekankan pada stratifikasi ekonomi, kebebasan politik individu kurang dijamin tetapi lebih menekankan pada perilaku yang menuruti kehendak kelompok kecil penguasa, kebutuhan moril dan nilai-nilai moral lebih menonjol dari pada kebutuhan materiil, dan lebih menekankan pada kolektivisme yang berdasarkan kekerabatan daripada individualisme.

1. Identitas Bersama

Faktor yang mempersatukan masyarakat dalam sistem politik ialah faktor primordial, seperti suku bangsa, ras, dan agama. Factor primordial acap kali terjelma dalam pribadi pemimpinnya sehingga pemimpin menjadi lambang kebersamaan dalam suku bangsa, ras tau agama.

1. Hubungan Kekuasaan

Kekuasaan dalam sistem ini cenderung bersifat pribadi, negatif, dan sebagian kecil lagi bersifat konsensus. Otokrat biasanya adalah seorang raja, sultan, atau emir yang hanya mempunyai peranan simbolis yang tinggi, tetapi kekuasaan yang nyata karena ia merupakan personifikasi identitas bersama, dan lembaga-lembaga politik yang ada.

Karena masyarakat hanya memiliki sumber kekuasaan yang sedikit dan mengalami kesukaran dalam melakukan pengawasan terhadap pihak penguasa maka kekuasaan dalam sistem ini bersifat negatif daripada kekuasaan positif.

1. Legitimasi Kewenangan

Kewenangan otokrat bersumber dan berdasarkan tradisi. Ia memiliki kewenangan karena ia merupakan keturunan dari pemimpin terdahulu. Para pendahulunya dipandang masyarakat sebagai orang yang harus memerintah karena asal-usul dan kualitas pribadinya. Kepercayaan dan tradisi ini selalu dipelihara dan dipertahankan oleh keturunan otokrat dengan berbagai cara, seperti mitos, legenda, dan simbol-simbol tertentu. Pada pihak lain, anggota masyarakat mengakui dan mentaati kewenangan otokrat karena tradisi yang turun-temurun.

1. Hubungan Ekonomi dan Politik

Dalam sistem ini terdapat jurang yang lebar dalam ekonomi, yaitu antara otokrat dan dan kelompok kecil elit penguasa yang mengitarinya, yang sekaligus juga pemegang kekayaan, dan massa petani yang tak memiliki apa-apa selain tenaga mereka. Para petani kebanyakan bertindak sebagai penggarap tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh tuan tanah.

Tuan tanah sebagai pemegang sumber kekuasaan di pedesaan menggunakan sumber kekuasaan yang dimiliki demi mempengaruhi pemerintah pusat dan daerah agar tidak mencampuri masalah yang dihadapi di pedesaan sehingga pemerintah tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat mengubah keadaan yang ada.

1. **Sistem Politik Totaliter**

Sistem politik totaliter sangat menekankan konsensus total di dalam masyarakatnya tatapi konflik total pula dengan musuhnya di dalam negeri maupun di luar negeri.untuk mencapai konsensus total dilakukan dengan indoktrinasi ideologi, pelaksanaan kekuasaan paksaan.

Sistem politik ini pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu komunis dan fasis. Keduanya menghendaki pengaturan masyarakat secara menyeluruh (total) atas dasar tertentu dengan kelompok kecil penguasa yamg memonopoli kekuasaan. Keduanya menempatkan kepentingan individu di bawah kehendak dan kepentingan partai tunggal yang mengatasnamakan Negara dan bangsa.

Jerman di bawah kekuasan Hitler dengan Nazi-nya, Italia di bawah Mussolini, dan jepang merupakan contoh Negara yang pernah menerapkan Fasisme. Sedangkan RRC, Vietnam, Korea Utara, Albania, dan kuba dalah Negara-negara komunis yang masih tersisa setelah Negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet meninggalkan Komunis pada Tahun 1989 dan 1991.

1. **Komunis**
2. Kebaikan Bersama

Sistem ini ditandai dengan prinsip sama rata sama rasa dalam bidang ekonomi, dan sekularisme yang radikal tatkala agama digantikan dengan ideologi komunis yang bersifat doktriner. Kebebasan politik individu dan hak-hak sipil untuk mengkritik penguasa partai tidak dijamin, tetapi sangat menekankan pada kemerdekaan nasional dan bebas dari penindasan asing.

1. Identitas bersama

Faktor sakral yang mempersatukan masyarakat dalam sistem ini adalah ideologi yang bersifat doktriner. Seluruh anggota masyarakat harus berperilaku sesuai dengan ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi tersebut. Penguasa mengindoktrinasikan ideologinya melalui sekolah, media massa, organisasi-organisasi yang menjadi bagian dari partai, lembaga kader, dan lembaga resosialisasi.

1. Hubungan Kekuasaan

Kekuasaan dalam sistem ini dimonopoli dan dilaksanakan secara sentral dengan partai tunggal. Kekuasaan paksaan yang dilaksanakan oleh militer dan polisi rahasia

1. Legitimasi Kewenangan

Dasar kewenangan pemimpin dalam sistem ini berupa peranan mereka sebagai ideologi, yaitu penafsir dan pelaksana ideologi yang bersifat doktriner. Pada pihak lain anggota masyarakat mentaati kewenangan pemimpin partai dan pemerintahan tidak saja karena mereka dipilih oleh anggota kongres sesuai dengan prosedur partai, tetapi juga pemegang kewenangan memiliki kemampuan menggunakan kekuasaan paksaan yang sangat luas dan mendalam.

1. Hubungan Politik dan Ekonomi

Pemerintah yang dikelola oleh partai tunggal mengendalikan kegiatan ekonomi dan koordinasi unit ekonomi maupun dalam pengadaan barabg dan jasa, kecuali itu, juga dalam kegiatan memproduksi maupun mendistribusikan barang dan jasa. Kegiatan ekonomi yang merupakan prakarsa individu atau swasta dilarang.

1. **Sistem Politik Demokrasi**

Dari sudut pandang struktural, sistem politik demokrasi secara ideal ialah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Artinya, demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara individu, diantara berbagai kelompok, antara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan diantara lembaga-lembaga pemerintah.

1. Kebaikan Bersama

Persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin dengan hukum. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan hidupnya.setiap individu bebas mencari, dan mendayagunakan kekayaan sepanjang dalam batas-batas yang disepakati bersama, seperti persaingan bebas yang wajar, undang-undang anti monopoli, dan peka pada lingkungan hidup.

1. Identitas Bersama

Faktor yang mempersatukan masyarakat dalam sistem politik demokrasi ialah bersatu dalam perbedaan. Contohnya Bhineka Tunggal Ika di Indonesia dan Unity in Diversity untuk Amerika.

1. Hubungan Kekuasaan

Dalam sistem ini terdapat distribusi kekuasaan yang relatif merata diantara kelompok sosial dan lembaga pemerintah. Situasi ini akan menimbulkan persaingan dan saling kontrol antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, lembaga pemerintah yang satu dengan yang lainnya ( eksekutif, legislatif, yudikatif). Akan tetapi, mereka mempunyai satu kesadaran dan kesepakatan bersama bahwa kekuasaan hanya sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sehingga diperlukan kesediaan untuk berkompromi dan bekerjasama.

1. Legitimasi Kewenangan

Prinsip kewenangan dan legitimasi dalam sistem ini bersifat prosedural (*rule of law)* yang diatur dalam konstitusi. Artinya, penguasa mendapatkan kewenangan berdasarkan prosedur yang disususun dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan, sedangkan anggota masyarakat mentaati kewenangan penguasa karena penguasa dipilih atau diangkat berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Dalam konstitusi biasanya diatur hak-hak warganegara.

1. Hubungan Politik dan Ekonomi

Berdasarkan kordinasi unit ekonomi maupun dalam pemilikan barang dan jasa, pemerintah dan swasta ikut ambil bagian secara aktif sesuai dengan setiap porsinya, artinya, disamping mekanisme pasar dibiarkan mengatur kegiatan ekonomi, tetapi didalam hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak pemerintah ikut mengatur dan mengarahkan kegiatan ekonomi.

**BUDAYA POLITIK**

1. **Budaya Politik Indonesia**

Budaya politik adalah landasan sistem politik, yang member jiwa atau warna pada system politik, atau yang member arah pada peran-peran politik yang dilakukan oleh struktur politik.

Budaya politik merupakan orientasi psikologis terhadap obyek sosial yang meliputi aspek kognitif , afektif dan evaluativ yang ditujukan kepada system politik secara umum. Atau, secara praktis, budaya politik merupakan seperangkat nilai-nilai yang menjadi dasar para actor untuk menjalankan tindakan-tindakan dalam ranah politik.

Latar budaya politik beranekaragam, antara lain terdiri atas ras, etnik, adat, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Dengan keragaman latar budaya politik tersebut dimungkinkan muncul sengketa politik, yang umumnya berkisar pada kepentingan ekonomi, kekuasaan, dan masalah-masalah khusus misalnya hak-hak warganegara. *Budaya politik* merupakan perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat , bangsa, atau Negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan politik kenegaraan.

**Pengertian budaya politik menurut para ahli**

Terdapat banyak sarjana ilmu politik yang telah mengkaji tema budaya politik, sehingga terdapat variasi konsep tentang budaya politik yang kita ketahui. Namun bila diamati dan dikaji lebih jauh, tentang derajat perbedaan konsep tersebut tidaklah begitu besar, sehingga tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambu yang sama. Berikut ini merupakan pengertian dari beberapa ahli ilmu politik tentang budaya politik.

**a. Rusadi Sumintapura**

Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

**b. Sidney Verba**

politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.

**c. Alan R. Ball**

Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.

**d. Austin Ranney**

Budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.

**e. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.**

Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas (dalam arti umum atau menurut para ahli), maka dapat ditarik beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut pertama : bahwa konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek non-perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah yang menyebabkan **Gabriel A. Almond** memandang bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis darisebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem politik.

Kedua : hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. Misal orientasi politik terhadap lembaga politik terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan sebagainya.

Ketiga : budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per-individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.

**Dari** pemahaman konsep tentang budaya politik dan hubunganya dengan sistem politik , dan hubunganya dengan system politik , Gabriel Almond mengklarifikasikan budaya politik sebagai berikut:

**Budaya politik parokial**

Pada budaya politik ini, tingkat partisipasi politiknya masih sangat rendah. Hal itu disebabkan faktor kognitif ( rendahnya faktor pendidikan)

**Budaya politik kaula**

Pada budaya politik ini, masyarakat yang bersangkutan sudah relative maju ( baik social maupun ekonominya) tetapi masih relative pasif.

**Budaya politik partisipan**

Yaitu budaya politik yang di tandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi.

Budaya politik dalam suatu masyarakat tidaklah lahir dengan sendirinya, orientasi pendidikan politik yang melahirkan kesadaran dan partisipan politik tentu ikut mewarnai budaya politik yang lahir. Oleh sebab itu suatu saat nanti rangkaian budaya politik yang terdapat di dalam masyarakat sangat mungkin mengalami perubahan dan perkembangan kearah yang lebih baik, menuju ke tingkat yang lebih mapan.

**Manfaat memahami konsep budaya politik**

Mengetahui sikap-sikao warganegaraterhadap sistem politik yang akan memengaruhi tuntutan-tuntutan, tanggapannya, dukunganya, serta orientasinya terhadap system politik itu. Dengan memahami hubungan antara budaya politik dan sistem politik , maksud-maksud individu melakukan kegiatanya dalam system politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan pergeseran politik dapat dimengerti.

**B. Tipe-tipe Budaya Politik yang Berkembang Dalam Masyarakat Indonesia**

**1. Berdasarkan Sikap Yang Ditunjukkan**

ada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memper­padukan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap ”militan” atau sifat ”tolenrasi”.

a. **Budaya Politik Militan**

Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi kriris, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.

b. **Budaya Politik Toleransi**

Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.

Jika pernyataan umum dari pimpinan masyarakat bernada sangat militan, maka hal itu dapat men­ciptakan ketegangan dan menumbuhkan konflik. Kesemuanya itu menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama. Pernyataan dengan jiwa tolerasi hampir selalu mengundang kerja sama. Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan. Budaya Politik terbagi atas :

**a. Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Absolut**

Budaya politik yang mempunyai sikap mental yang absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang. dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan. Pola pikir demikian hanya memberikan perhatian pada apa yang selaras dengan mentalnya dan menolak atau menyerang hal-hal yang baru atau yang berlainan (bertentangan). Budaya politik yang bernada absolut bisa tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, malah hanya berusaha memelihara kemurnian tradisi. Maka, tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru.

**b. Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Akomodatif**

Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan sedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini.

Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan. Tiap perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya yang harus dikendalikan. Perubahan dianggap sebagai penyim­pangan. Tipe akomodatif dari budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.

**1. Berdasarkan Orientasi Politiknya**

Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, **Gabriel Almond** mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :

a. **Budaya politik parokial** (parochial political culture), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).

b. **Budaya politik kaula** (subyek political culture), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.

c. **Budaya politik partisipan** (participant political culture), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa terbentuknya budaya politik merupakan gabungan dari ketiga klasifikasi tersebut di atas. Tentang klasifikasi budaya politik di dalam masyarakat lebih lanjut adalah sebagai berikut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Budaya Politik** | **Uraian / Keterangan** |
| 1. | **Parokial** | a. Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, obyek-obyek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol.  b. Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat.  c. Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik.  d. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.  e. Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim.  f. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif. |
| 2. | **Subyek/Kaula** | a. Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap obyek-obyek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.  b. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah  c. Hubungannya terhadap sistem plitik secara umum, dan terhadap output, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif.  d. Sering wujud di dalam masyarakat di mana tidak terdapat struktur input yang terdiferensiansikan.  e. Orientasi subyek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif. |
| 3. | **Partisipan** | a. Frekuensi orientasi politik sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu.  b. Bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara komprehensif dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek input dan output sistem politik)  c. Anggota masyarakat partisipatif terhadap obyek politik  d. Masyarakat berperan sebagai aktivis. |

Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan mengerti bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Mereka memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan dan memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes bila terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak fair.

Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah, yang ditunjukan oleh tingkat kompetensi politik, yaitu menyelesaikan sesuatu hal secara politik, dan tingkat efficacy atau keberdayaan, karena mereka merasa memiliki setidaknya kekuatan politik yang ditunjukan oleh warga negara. Oleh karena itu mereka merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya saling percaya (trust) antar warga negara. Oleh karena itu dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik.

Budaya Politik subyek lebih rendah satu derajat dari budaya politikpartisipan. Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka akan merasa tidak nyaman bila membicarakan masalah-masalah politik.

Demokrasi sulit untuk berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subyek, karena masing-masing warga negaranya tidak aktif. Perasaan berpengaruh terhadap proses politik muncul bila mereka telah melakukan kontak dengan pejabat lokal. Selain itu mereka juga memiliki kompetensi politik dan keberdayaan politik yang rendah, sehingga sangat sukar untuk mengharapkan artisipasi politik yang tinggi, agar terciptanya mekanisme kontrol terhadap berjalannya sistem politik.

Budaya Politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah, yang didalamnya masyarakat bahkan tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik.

Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik. Oleh karena itu terdapat kesulitan untuk mencoba membangun demokrasi dalam budaya politik parokial, hanya bisa bila terdapat institusi-institusi dan perasaan kewarganegaraan baru. Budaya politik ini bisa dtemukan dalam masyarakat suku-suku di negara-negara belum maju, seperti di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

Namun dalam kenyataan tidak ada satupun negara yang memiliki budaya politik murni partisipan, pariokal atau subyek. Melainkan terdapat variasi campuran di antara ketiga tipe-tipe tersebut, ketiganya menurut **Almond** dan **Verba** tervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik, yaitu :

a. Budaya politik subyek-parokial (the parochial- subject culture)

b. Budaya politik subyek-partisipan (the subject-participant culture)

c. Budaya politik parokial-partisipan (the parochial-participant culture)

Berdasarkan penggolongan atau bentuk-bentuk budaya politik di atas, dapat dibagi dalam tiga model kebudayaan politik sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Model-Model Kebudayaan Politik** | | |
| **Demokratik Industrial** | **Sistem Otoriter** | **Demokratis Pra Industrial** |
| Dalam sistem ini cukup banyak aktivis politik untuk menjamin adanya kompetisi partai-partai poli-tik dan kehadiran pemberian suara yang besar. | Di sini jumlah industrial dan modernis sebagian kecil, meskipun terdapat organisasi politik dan partisipan politik seperti mahasiswa, kaum in-telektual dengan tindakan persuasif menentang sis-tem yang ada, tetapi seba-gian besar jumlah rakyat hanya menjadi subyek yang pasif. | Dalam sistem ini hanya terdapat sedikit sekali parti-sipan dan sedikit pula keter-libatannya dalam peme-rintahan |

Pola kepemimpinan sebagai bagian dari budaya politik, menuntut konformitas atau mendorong aktivitas. Di negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah diharapkan makin besar peranannya dalam pembangunan di segala bidang. Dari sudut penguasa, konformitas menyangkut tuntutan atau harapan akan dukungan dari rakyat. Modifikasi atau kompromi tidak diharapkan, apalagi kritik. Jika pemimpin itu merasa dirinya penting, maka dia menuntut rakyat menunjuk­kan kesetiaannya yang tinggi. Akan tetapi, ada pula elite yang menyadari inisiatif rakyat yang menentukan tingkat pembangunan, maka elite itu sedang mengembang­kan pola kepemimpinan inisiatif rakyat dengan tidak mengekang kebebasan.

Suatu pemerintahan yang kuat dengan disertai kepasifan yang kuat dari rakyat, biasanya mempunyai budaya politik bersifat agama politik, yaitu politik dikembang­kan berdasarkan ciri-ciri agama yang cenderung mengatur secara ketat setiap anggota masyarakat. Budaya tersebut merupakan usaha percampuran politik dengan ciri-ciri keagamaan yang dominan dalam masyarakat tradisional di negara yang baru berkembang.

**C. Penerapan Budaya politik Partisipan**

**1. Pengertian Partisipasi Politik**

Pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media masa yang kritis dan aktif. Hal ini merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan).

Bagi sebagian kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik, bukan sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau berupa kebijakan politik, tetapi terlibat juga dalam implementasinya yaitu ikut mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut.

**Partisipasi Politik** adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut **Myron Weiner**, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut :

1. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
3. Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
4. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

**2. Konsep Partisipasi Politik**

Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukanya tradisi pendekatan behavioral (perilaku) dan Post Behavioral (pasca tingkah laku). Kajian-kajian partisipasi politik terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan.

Dalam ilmu politik sebenarnya apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi politik ? siapa saja yang terlibat ? apa implikasinya ? bagaimana bentuk praktik-praktiknya partisipasi politik ? apakah ada tingkatan-tingkatan dalam partisipasi politik ? beberapa pertanyaan ini merupakan hal-hal mendasar yang harus dijawab untuk mendapat kejelasan tentang konsep partisipasi politik.

Hal pertama yang harus dijawab berkenaan dengan kejelasan konsep partisipasi politik. Beberapa sarjana yang secara khusus berkecimpung dalam ilmu politik, merumuskan beberapa konsep partisipasi politik, yang disampaikan dalam tabel berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sarjana** | **Konsep** | **Indikator** |
| **Kevin R. Hardwick** | Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. | · Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah  · Terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat publik. |
| **Miriam Budiardjo** | Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). | · Berupa kegiatan individu atau kelompok  · Bertujuan ikut aktif dalam ke-hidupan politik, memilih pim-pinan publik atau mempenga-ruhi kebijakan publik. |
| **Ramlan Surbakti** | Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.  Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. | · Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik  · Dilakukan oleh warga negara biasa |
| **Michael Rush dan Philip Althoft** | Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. | · Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik  · Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi |
| **Huntington dan Nelson** | Partisipasi politik … kegiatan warga negara preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah. | · Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan  · Memiliki tujuan mempengaruh kebijakan publik  · Dilakukan oleh warga negara preman (biasa) |
| **Herbert McClosky** | Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. | · Berupa kegiatan-kegiatan sukarela  · Dilakukan oleh warga negara  · Warga negara terlibat dalam proses-proses politik |

Berdasarkan beberapa defenisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa sarjana ilmu politik tersebut, secara substansial menyatakan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh non-warga negara biasa.